



PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
DINAS KOMINFO, STATISTIK DAN
PERSANDIAN

Jl. Mohammad Hatta - Kuala Pembuang (74212) Kalimantan Tengah
SMS Center : 0821 4400 4400 Email : diskominfo@seruyankab.go.id
Website : diskominfo.seruyankab.go.id

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
(LKjIP)
TAHUN 2023

KUALA PEMBUANG
2024

LKjIP Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Seruyan Tahun 2023

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayahNya, sehingga Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan dapat menyelesaikan tugas-tugas kegiatan dan operasional dengan baik, sesuai dengan rencana kerja/ rencana strategis yang telah disusun dalam tahun 2023. Untuk dapat mengetahui lebih jauh atas program dan kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut, maka disajikan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan tahun 2023. Dalam Laporan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan ini, hanya dikemukakan secara garis besar atau secara umum, dengan aspek-aspek perencanaan strategik yang meliputi rumusan visi dan misi, tujuan, sasaran, serta pengukuran kinerja dengan maksud sebagai pertanggungjawaban Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Seruyan, juga dapat digunakan sebagai pedoman dan arah yang akan digunakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

Kami juga menyadari bahwa apa yang dilakukan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan selama ini masih banyak kekurangan didalam melaksanakan tugas-tugas program dan kegiatan, yang semuanya itu mudah - mudahan dapat diperbaiki dimasa-masa yang akan datang dan semoga hal ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Kuala Pembuang, Februari 2024

Kepala Dinas Komunikasi,
Informatika, Statistik dan Persandian



dr. H. RESON RUSDIANTO, M.A.P
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19770222 200604 1 012

RINGKASAN EKSEKUTIF

Keberhasilan Pencapaian Kinerja di bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang telah dicapai oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan pada tahun 2023 meliputi : 5 (lima) sasaran strategis, dengan 5 (lima) indikator sebesar : 93,52%, dengan **kriteria Berhasil**.

- a. Meningkatnya Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota sebesar 93,64% (berhasil)
- b. Meningkatnya program informasi dan komunikasi publik, dengan indikator Persentase cakupan layanan telekomunikasi sebesar 99,66% (berhasil).
- c. Meningkatnya program aplikasi informatika, dengan indikator Proporsi rumah tangga dengan akses internet sebesar 28,06%(tidak berhasil).
- d. Meningkatnya program penyelenggaraan statistik sektoral, dengan indikator Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi 85,90% (berhasil).
- e. Meningkatnya program penyelenggaraan persandian untuk pengaman informasi, dengan indikatornya adalah Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah sebesar 0 % (tidak berhasil).

Program dan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp.7.219.129.474,- telah terealisasi Rp 6.751.212.895,- atau 93,52%.

Permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja 5 (lima) sasaran strategis, dengan 5 (lima) indikator adalah :

- a. Terbatasnya Anggaran dan SDM, Sistem tidak terpadu dan terintegrasi, serta Data masih terpencar-pencar;
- b. Belum ada standar pengelolaan data sistem yang baik;
- c. Pembangunan sistem/ aplikasi masih bersifat *sporadic*;

- d. SDM untuk pengelolaan TIK masih kurang dan belum terorganisasi dengan baik;
- e. Faktor Internal, belum meratanya pemahaman para birokrat mengenai manfaat pentingnya Teknologi Informasi untuk kelancaran kinerja organisasi yang efektif, efisien transparan dan akuntabel secara terstruktur;
- f. Faktor Eksternal, kurangnya pemanfaatan oleh masyarakat terhadap portal-portal pelayanan publik yang disediakan di website Pemerintah Daerah yang disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai internet;
- g. Pelaksanaan Penyelenggaraan Statistik Sektorial dengan melaksanakan kompilasi produk Administrasi yaitu pengumpulan data skunder dan masing-masing SKPD lingkup Kabupaten dalam pelaksanaannya masih terdapat Dinas yang belum berkompeten menyelesaikan data yang diminta.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	I
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	II
DAFTAR ISI	IV
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum	3
C. Maksud dan Tujuan	3
D. Struktur Organisasi	4
E. Sistematika Penyusunan Laporan	5
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	7
A. Rencana Strategis 2019-2023.....	7
1. Visi Kabupaten Seruyan	7
2. Misi Kabupaten Seruyan	7
3. Tujuan Strategis	8
4. Sasaran Strategis	8
5. IKU Kepala dinas	9
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	11
A. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2023	12
B. Realisasi Anggaran (Akuntabilitas Keuangan)	33
BAB IV PENUTUP.....	34
A. Kesimpulan	34
B. Saran	35

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan merupakan salah satu perangkat daerah yang dibentuk sesuai dengan Peraturan Daerah nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan (lembaran Daerah Kabupaten Seruyan tahun 2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76); guna membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, khususnya bertanggung jawab dibidang Komunikasi dan Informatika, terutama dalam pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan telekomunikasi dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada publik. Teknologi informasi dan komunikasi sudah memberikan berbagai bukti dan mampu menciptakan media yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu dalam mentransformasikan informasi dari dan ke berbagai penjuru dunia, sangat menjanjikan bagi perangkat daerah sebagai salah satu solusi dalam mewujudkan *e-Government*.

Pemerintah daerah harus mampu memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengolah, menyalurkan dan mendistribusikan informasi kepada internal pemerintah daerah dalam mendukung proses pengambilan keputusan, sedangkan dalam lingkup eksternal untuk pelayanan masyarakat (*public services*). Dalam upaya mewujudkan implementasi *e-Government* cakupannya tidak hanya pada aspek teknis saja, akan tetapi mencakup aspek non teknis berupa komitmen dari pemerintah daerah dan pucuk pimpinan perangkat daerah. Secara garis besar ada empat komponen pokok yang perlu terus didorong kesiapannya yakni infrastruktur (jaringan komunikasi dan informasi), konten, aplikasi, dan sumber daya manusia. Dinas Komunikasi, Informatika , Statistik dan Persandian

Kabupaten Seruyan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan sebagai implementasi dari terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, dihadapkan oleh masalah yang terjadi sehingga baik secara langsung maupun tidak langsung menjadi tantangan dalam proses pemerintahan. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, permasalahan utama (Isu Strategis) yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan adalah sebagai berikut :

- a. Dalam perumusan kebijakan teknis bidang Komunikasi dan Informatika sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah, yaitu perbaikan tata kelola pemerintahan melalui optimalisasi pemanfaatan IT dalam manajemen pemerintahan masih kurangnya dukungan kebijakan teknis dalam bidang Komunikasi dan Informatika.
- b. Dalam perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis teknologi informatika dan aplikasi telematika masih kurangnya infrastruktur jaringan TI baik secara makro ataupun mikro sebagai penunjang aplikasi pelayanan publik serta aplikasi yang dibuat oleh masing-masing perangkat daerah untuk pelayanan publik masih belum terintegrasi secara optimal sehingga memungkinkan untuk diretas (*crack*) oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Disamping itu masih kurangnya pengembangan kemampuan sumber daya manusia dalam Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- c. Dalam perumusan, perencanaan pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis Informasi Komunikasi Publik masih sangat minimnya pengetahuan masyarakat tentang informasi mengenai pembangunan di Kabupaten Seruyan.

- d. Dalam perumusan, perencanaan pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis pengawasan dan pengendalian masih adanya daerah *blank spot* di wilayah Kabupaten Seruyan terutama di daerah perbatasan, pedalaman, dan daerah tertinggal dimana pihak swasta tidak memungkinkan untuk membangun infrastruktur tersebut dikarenakan belum dinilai menguntungkan.
- e. Kurangnya kerjasama dan koordinasi dengan lembaga atau instansi vertikal dalam bidang Kominfo dengan tujuan melayani penyebaran informasi pembangunan daerah.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara atas laporan kinerja instansi;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan penyelenggaraan perencanaan program dan kegiatan yang dipercayakan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan sebagai penerima amanat dan dalam penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan

(disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan kinerja adalah :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

D. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan meliputi : 1 (satu) orang Kepala Dinas (Eselon IIa), 1 (satu) orang Sekretaris (Eselon IIIa), 4 (empat) Kepala Bidang (Eselon IIIb) dan 2 (dua) Kepala Subbag (Eselon IVa) serta Kelompok Jabatan Fungsional. Bagan Dinas Komunikasi, Informatika , Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan terdiri dari :

a. Kepala Dinas.

b. Sekretariat.

1. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan

2. Kepala Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian

c. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

d. Kepala Bidang Teknologi Informatika, Telekomunikasi dan *E-Government*

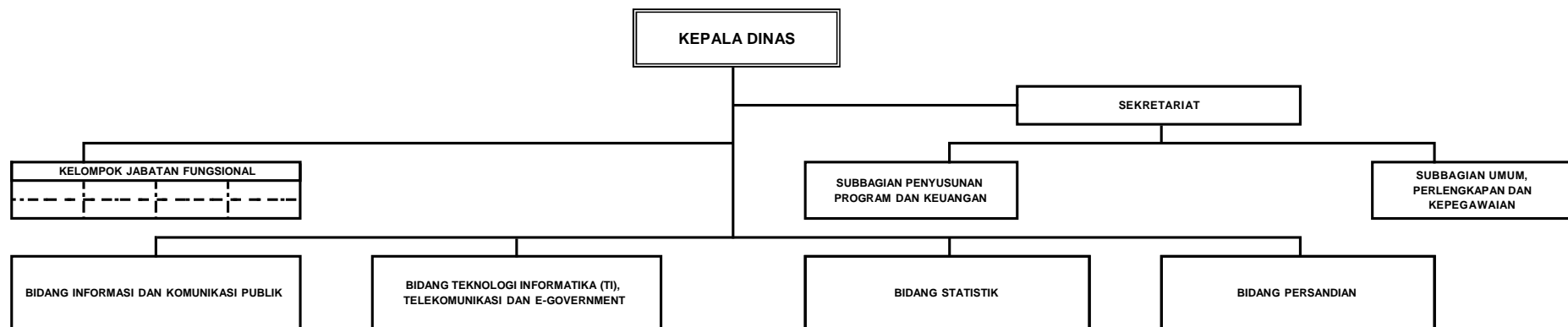
e. Kepala Bidang Statistik

f. Kepala Bidang Persandian

g. Kelompok Jabatan Fungsional

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SERUYAN NOMOR 22
TAHUN 2022
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA PADA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN KABUPATEN SERUYAN**

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS
KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN SERUYAN**



E. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAPORAN

Penyusunan laporan disusun dengan sistematika :

I. PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, dengan penekanan kepada aspek strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

II. PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

IV. PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Matrik Renstra

B. Perjanjian Kinerja

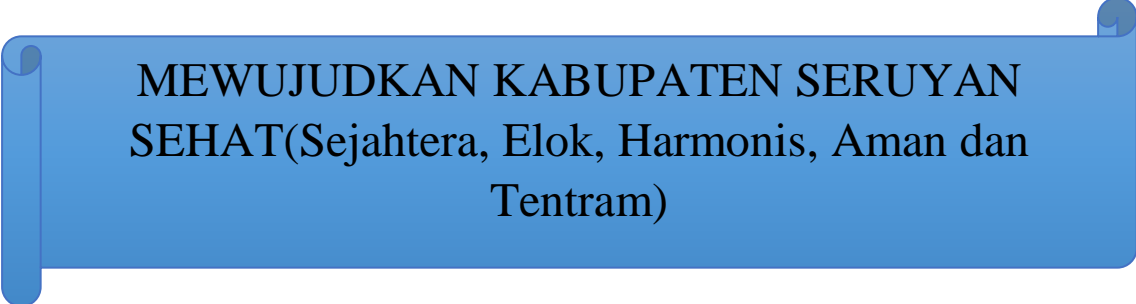
BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, kendala, dan ancaman yang mungkin terjadi. Dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi, maka ditetapkan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seruyan yang terdiri dari sasaran strategis dan indikator kinerja yang harus dicapai Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan selama 5 (lima) tahun mulai 2019-2023. Secara umum sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan tahun 2023 senantiasa mengacu dan berpedoman kepada visi dan misi Bupati Seruyan sebagaimana termuat dalam rencana Strategis Kabupaten Seruyan yang telah ditetapkan.

A. Rencana Strategis 2019 – 2023

1. Visi Kabupaten Seruyan



**MEWUJUDKAN KABUPATEN SERUYAN
SEHAT(Sejahtera, Elok, Harmonis, Aman dan
Tentram)**

2. Misi Kabupaten Seruyan

Dalam mewujudkan visi tersebut, pemerintah Kabupaten Seruyan menjabarkan kedalam misi pembangunan Kabupaten Seruyan tahun 2018–2023 yaitu;

1. Menciptakan pemerintahan yang bersih dan baik serta profesional;

2. Mewujudkan mutu pendidikan yang lebih berkualitas, baik pendidikan formal maupun nonformal;
3. Memberikan pelayanan kesehatan yang prima serta berkualitas kepada masyarakat;
4. Mengembangkan serta menghidupkan perekonomian rakyat yang berbasis pada ekonomi kerakyatan, mulai dari industri kecil, industri rumah tangga, perdagangan, dan koperasi;
5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas;
6. Mewujudkan pelabuhan teluk segintung sebagai pintu gerbang ekonomi Kabupaten Seruyan;
7. Meningkatkan, Mengembangkan dan memberdayakan potensi Sumber daya alam, pertanian, perikanan, peternakan, kelautan perkebunan dan kehutanan;
8. Mengembangkan sektor pariwisata, seni dan budaya;
9. Menciptakan lapangan pekerjaan, serta menjamin hak tenaga kerja;
10. Menciptakan rasa aman, kehidupan yang damai, rukun, harmonis, agamis, dan tentram dalam bingkai NKRI.

3. Tujuan Strategis

Agar dapat diukur keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan strategisnya, maka setiap tujuan strategis yang ditetapkan disertai sasaran strategis dan indikator kinerja (*performance indicator*) yang terukur. Rumusan tujuan strategis tersebut diuraikan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
- b. Terwujudnya kelompok komunikasi informasi masyarakat berbasis teknologi informasi dan komunikasi

4. Sasaran Strategis

Dalam mewujudkan tujuan strategis tersebut, sasaran yang ingin dicapai adalah :

- a. Meningkatnya penggunaan sistem informasi daerah.
- b. Meningkatnya kualitas pelayanan data dan statistik.

- c. Meningkatnya pemberdayaan kelompok masyarakat dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

5. Indikator Kinerja Utama Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Prinsip *Good Governance* atau pemerintahan yang baik merupakan sebuah komitmen yang mutlak dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan bercirikan profesionalisme, transparan, efektif, efisien akuntabel, demokratis dengan tetap menjunjung supremasi hukum. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan tingkat ketercapaian sasaran atau kegiatan, yang selanjutnya dituangkan dalam Indikator Kinerja. Agar sasaran kegiatan dan program berjalan efektif, efisien dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran indikator kinerja strategis yang menjadi prioritas di setiap instansi pemerintah. Melalui Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang pedoman umum Penetapan Indikator Kerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja Utama melibatkan pemangku kepentingan dilingkungan lembaga / Instansi pemerintah yang bersangkutan, maka Pimpinan Instansi Pemerintah diwajibkan menetapkan Indikator Kinerja Utama. Sehingga dengan disusunnya Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2019-2023 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan, diharapkan indikator kinerja dan target capaian kinerja dapat terukur dan dicapai sehingga terwujudnya “*Good Governance*”.

KEPUTUSAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2023 DILINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN

Unit Kerja

:

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Jabatan

:

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Tugas

:

Melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang komunikasi, informatika, statistik dan Persandian

Fungsi

:

a. Perumusan kebijakan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan Persandian

b. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan Persandian

c. Koordinasi, fasilitasi dan pengawasan/pengendalian penyelenggaraan kegiatan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan Persandian

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULA PERHITUNGAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	FORMULA PERHITUNGAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	IKU. Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah dan kualitas pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Hasil Penilaian Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Jumlah Kegiatan yg dilaksanakan dalam Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kegiatan dibagi Realisasi x 100%	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yg dilaksanakan	Jumlah Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan dibagi Jumlah Seluruh Kegiatan x 100%	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Seruyan	Hasil Penilaian Implementasi RB dari Kemenpan RB	Perencanaan							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
				Nilai SAKIP	Nilai Evaluasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Seruyan	Hasil Penilaian Implementasi SAKIP dari Kemenpan RB	Perencanaan				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dibagi dengan jumlah Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan direncanakan x 100%	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN
											Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian yang dilaksanakan dibagi seluruh Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah x 100%	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
														Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
														Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
											Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana dibagi jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah x 100%	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan
														Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan
														Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
														Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
														Penyediaan Barang Cetak dan Penggadaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggadaan yang Disediakan
														Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
														Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
											Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan dibagi jumlah seluruh kegiatan x 100%	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

dr. H. RESON RUSDIANTO, M.A.P
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19770222 200604 1 012

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan tahun 2023 dapat dimanfaatkan untuk tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, selain itu juga sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan.

PERJANJIAN KINERJA T A H U N 2023



Pemerintah Daerah
Kabupaten
Seruyan

Dinas Komunikasi,
Informatika, Statistik
Dan Persandian

KATA PENGANTAR

Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023 pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan disusun sesuai dengan format yang telah ditentukan. Penyusunannya merupakan bentuk Pertanggung Jawaban Kinerja yang dicapai atas penyelenggaraan tugas pokok, fungsi dan penggunaan anggaran serta pelaksanaan rencana kerja tahunan yang telah dilaksanakan.

Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan tahun 2023 dapat dimanfaatkan untuk tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, selain itu juga sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan.

Dalam penyusunan laporan Perjanjian Kinerja ini telah berusaha semaksimal mungkin, namun laporan ini masih banyak kekurangan yang tentunya memerlukan evaluasi sebagai penyempurnaan dalam penulisan serta perumusan kebijakan selanjutnya dan diikuti peningkatan kinerja yang lebih baik serta kerja keras oleh seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Kepala Dinas Komunikasi,
Informatika, Statistik dan Persandian



dr. H. RESON RUSDIANTO, M.A.P
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19770222 200604 1 012

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Struktur Organisasi	2
1.3 Dasar Hukum	3-7
BAB II PENETAPAN PERENCANAAN KINERJA	8
2.1 Rencana Strategis	8
2.2 Tujuan dan Sasaran.....	9-10
2.3 Program dan Kegiatan	11
BAB III PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023	12-34
BAB IV PENUTUP	35

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara serta terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur *legilemate* sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan adanya pemerintahan yang baik perlu mengadakan perencanaan, perjanjian kinerja dan pengukuran kinerja sesuai batasan waktu yang telah ditentukan dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan sebagai komitmen pemerintah dalam meyelenggarakan manajemen pemerintahan dan pembangunan dalam mencapai tujuan pada Visi dan Misi Kabupaten Seruyan sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seruyan.

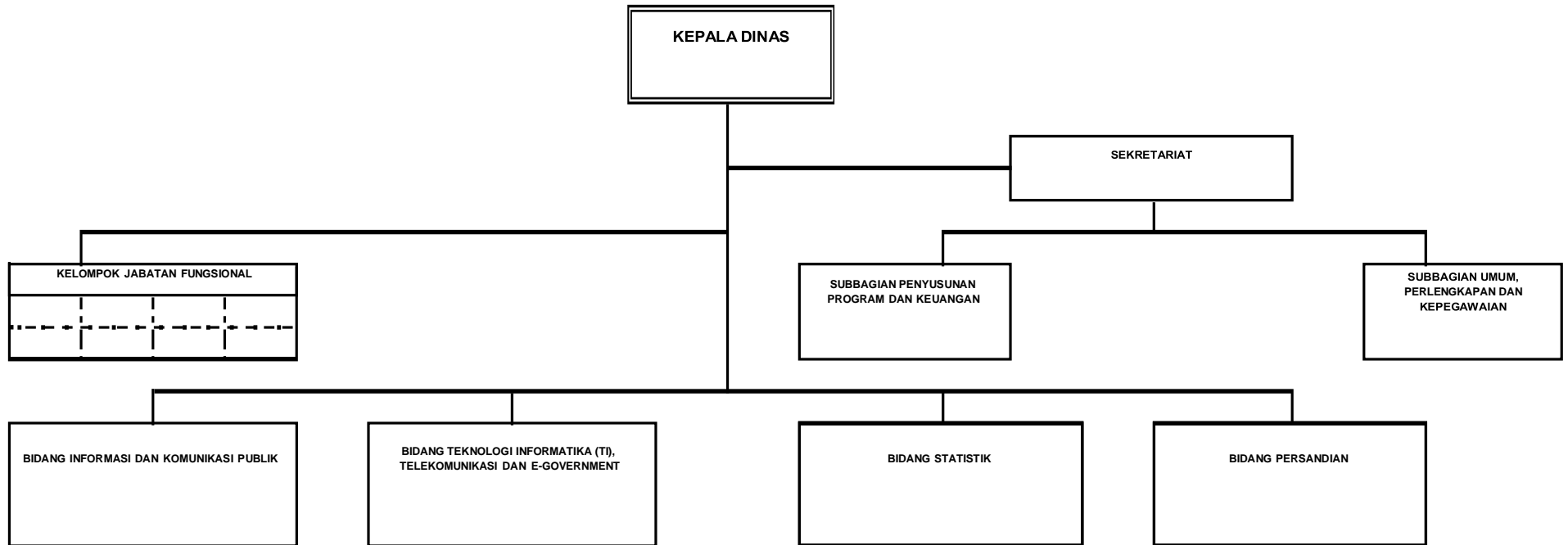
1.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan meliputi : 1 (Satu) orang Kepala Dinas (Eselon IIa), 1 (Satu) orang Sekretaris (Eselon IIIa), 4 (Empat) Kepala Bidang (Eselon IIIb) dan 2 (Dua) Kepala Subbag (Eselon IVa) serta 5 (Lima) Jabatan Fungsional (Eselon IVa).

Bagan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat.
 1. Kasubbag Umum, Pelengkapan dan Kepegawaian
 2. Kasubbag Penyusunan Program dan Keuangan
 3. Perencana Ahli Muda
- c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
 1. Pranata Humas Ahli Muda
- d. Bidang Teknik Informatika dan E-Government
 1. Pranata Komputer Ahli Muda
 2. Pranata Komputer Ahli Muda
- e. Bidang Statistik
 - 1 Statistik Ahli Muda
- f. Bidang Persandiann

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2023



1.3 Dasar Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 dilakukan dengan berlandaskan kepada beberapa ketentuan hukum, perundang-undangan, dan peraturan pendukung lainnya sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
29. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
30. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
31. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1);
32. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 102);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2009 Nomor 33);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2019 Nomor 47, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2019 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 77), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 85);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2020 Nomor 62, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 75);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);

BAB II PERENCANAAN KINERJA

PENETAPAN PERENCANAAN KINERJA

Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Tahun Anggaran : 2023

No.	Sasaran Strategis	IKU Sasaran Strategis	Target	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	1. Indeks Reformasi Birokrasi 2. Nilai SAKIP	100%	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Penyusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
					2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
					3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

					4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	<div>1. Penyediaan Kompenen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor</div> <div>2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</div> <div>3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</div> <div>4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor</div> <div>5. Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan</div> <div>6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan</div> <div>7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</div>
					5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<div>1. Pengadaan Mebel</div>
					6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<div>1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat</div> <div>2. Penyediaan Jasa Komunikasi,</div>

						<p>Sumber Daya Air dan Listrik</p> <p>3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</p>
					<p>7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p>	<p>1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabaran</p> <p>2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</p>
2	Terlaksananya Program Informasi dan Komunikasi Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (KIM)	100%	Informasi dan Komunikasi Publik	1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	1. Pengelolaan Media Komunikasi Publik
3	Terlaksananya Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Nilai Indeks Kepuasan Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Internet	100%	Pengelolaan Aplikasi Informatika	1. Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	<p>1. Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah</p> <p>2. Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah</p>

4	Terlaksananya program penyelenggaraan statistik sektoral	Nilai Indeks Data Statistik Sektoral yang disajikan	100%	Penyelenggaraan Statistik Sektoral	1. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	1. Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral
5	Terlaksananya program penyelenggaraan persandian untuk pengaman informasi	Nilai Indeks Perangkat Daerah yang telah Menggunakan Sandi	100%	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	1. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1. Pelaksanaan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumberdaya keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : dr. H. Reson Rusdianto, M.A.P

Jabatan : Kepala Dinas Kominfo, Statistik Dan Persandian

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : YULHAIDIR

Jabatan : Bupati Seruyan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, Februari 2023

**Pihak Kedua
Bupati Seruyan**



YULHAIDIR

**Pihak Pertama
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik Dan Persandian**



**dr. H. RESON RUSDIANTO, M.A.P
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19770222 200604 1 012**



PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN

Jalan Mohammad Hatta – Kuala Pembuang Kabupaten Seruyan (74212)

Sms Center 0821 4400 4400 Email : diskominfo@seruyankab.go.id

Website : diskominfo.seruyankab.go.id

KALIMANTAN TENGAH

PERJANJIAN KINERJA
BULANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel Serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : dr. H. Reson Rusdianto, M.A.P
Jabatan : Kepala Dinas Komlinfo, Statistik dan Persandian
Sebagai : Pihak Pertama

Nama : YULHAIDIR
Jabatan : Bupati Seruyan
Sebagai : Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan membuat laporan target rencana kinerja yang direalisasikan pada Laporan Triwulan, yang termuat dalam Rencana Aksi Pelaporan dan Pengukuran Kinerja terlampir.

Pihak kedua akan melakukan supervisi, yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang,

Februari 2023

Pihak Kedua
Bupati Seruyan



YULHAIDIR

Pihak Pertama
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik Dan Persandian



dr. H. RESON RUSDIANTO, M.A.P
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19770222 200604 1 012

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

No.	Sasaran Kinerja/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Indeks Reformasi Birokrasi Nilai SAKIP	100%
2.	Terlaksananya Program Informasi dan Komunikasi Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (KIM)	100%
3.	Terlaksananya Program Aplikasi Informatika	Nilai Indeks Kepuasan Rumah Tangga yang memiliki Akses Internet	100%
4.	Terlaksananya program penyelenggaraan statistik sektoral	Nilai Indeks Data Statistik Sektoral yang disajikan	100%
5.	Terlaksananya program penyelenggaraan persandian untuk pengaman informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Indeks Perangkat Daerah yang telah Menggunakan Sandi	100%

Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan (APBD/APBN)
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 5.550.642.474,-	APBD
➤ Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 8.250.000,-	
- Sub Kegiatan Penyusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 4.5000.000,-	
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 3.750.000,-	
➤ Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 3.626.363.802,-	
- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 3.624.203.802,-	
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 2.160.000,-	
➤ Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 69.560.000,-	
- Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp 69.560.000,-	

➤ Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 858.760.000,-
- Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Rp 3.635.000,-
- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 249.872.500,-
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 3.293.500,-
- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 94.999.000,-
- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Rp 9.250.000,-
- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 11.580.000,-
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 486.130.000,-
➤ Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 21.000.000,-
- Pengadaan Mebel	Rp 21.000.000,-
➤ Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 765.162.872,-
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 4.400.000,-
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 99.959.400,-
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 660.803.472,-
➤ Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 201.545.800,-
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 177.915.800,-
- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 23.630.000,-

	Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan (APBD/APBN)
2.	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Rp 1.075.775.000,-	APBD

- Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Rp 1.075.775.000,-
- Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik Rp 1.075.775.000,-

Program /Kegiatan /Sub Kegiatan

Anggaran

**Keterangan
(APBD/APBN)**

3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika **Rp 177.712.000,-** APBD
- Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Rp 177.712.000,-
 - Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah Rp 127.712.000,-
 - Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah Rp 50.000.000,-

Program /Kegiatan /Sub Kegiatan

Anggaran

**Keterangan
(APBD/APBN)**

4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral **Rp 50.000.000,-** APBD
- Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Rp 50.000.000,-
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral Rp 50.000.000,-

Program /Kegiatan /Sub Kegiatan

Anggaran

**Keterangan
(APBD/APBN)**

5. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi **Rp 15.000.000,-** APBD
- Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Rp 15.000.000,-
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumberdaya keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota Rp 15.000.000,-

Pihak Kedua
Bupati Seruyan



YULHAIDIR

Pihak Pertama
**Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik Dan Persandian**



dr. H. RESON RUSDIANTO, M.A.P
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19770222 200604 1 012



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : BONO SUHENDRA, ST

Jabatan : Sekretaris Dinas Kominfo, Statistik Dan Persandian

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. H. RESON RUSDIANTO, M.A.P

Jabatan : Kepala Dinas Kominfo, Statistik Dan Persandian

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, Februari 2023

Pihak Kedua

**Kepala Dinas Komunikasi,
Informatika, Statistik Dan Persandian**



dr. H. RESON RUSDIANTO, M.A.P
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19770222 200604 1 012

Pihak Pertama

**Sekretaris Dinas Komunikasi,
Informatika, Statistik Dan Persandian**

BONO SUHENDRA, ST
Pembina (IV/a)
NIP. 19740729 200604 1 015

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

No.	Sasaran Kinerja/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100%
		Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
		Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
		Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
		Jumlah Kegiatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
		Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
		Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan (APBD/APBN)
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 5.550.642.474,-	APBD
➤ Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 8.250.000,-	
- Sub Kegiatan Penyusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 4.5000.000,-	
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 3.750.000,-	
➤ Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 3.626.363.802,-	
- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 3.624.203.802,-	
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 2.160.000,-	
➤ Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 69.560.000,-	

- Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp 69.560.000,-
➤ Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 858.760.000,-
- Sub Kegiatan Penyediaan Kompenen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Rp 3.635.000,-
- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 249.872.500,-
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 3.293.500,-
- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 94.999.000,-
- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Rp 9.250.000,-
- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 11.580.000,-
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 486.130.000,-
➤ Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 21.000.000,-
- Pengadaan Mebel	Rp 21.000.000,-
➤ Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 765.162.872,-
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 4.400.000,-
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 99.959.400,-
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 660.803.472,-
➤ Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 201.545.800,-
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 177.915.800,-
- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 23.630.000,-

Pihak Kedua

**Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik Dan Persandian**



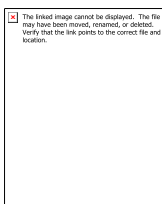
dr. H. RESON RUSDIANTO, M.A.P
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19770222 200604 1 012

Pihak Pertama

**Sekretaris Dinas Komunikasi,
Informatika, Statistik Dan Persandian**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Bono Suhendra', written in a cursive style.

BONO SUHENDRA, ST
Pembina (IV/a)
NIP. 19740729 200604 1 015



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : RUBI KUSWANTO, S.Sos.I., M.A.P

Jabatan : Kepala Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. H. RESON RUSDIANTO, M.A.P

Jabatan : Kepala Dinas Kominfo, Statistik Dan Persandian

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, Februari 2023

Pihak Kedua

**Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik Dan Persandian**



dr. H. RESON RUSDIANTO, M.A.P
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19770222 200604 1 012

Pihak Pertama

**Kepala Bidang Informasi dan
Komunikasi Publik**

RUBI KUSWANTO, S.Sos.I., M.A.P
Pembina (IV/a)
NIP. 19771231 200903 1 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

No.	Sasaran Kinerja/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya media informasi untuk pelayanan informasi baik pemerintah maupun masyarakat	Persentase pengembangan dan pelayanan media informasi	100%
2.	Terlaksananya Kerjasama dengan Media Massa yang Menyebarkan Informasi Pembangunan Daerah	Persentase Kerjasama Informasi dengan Media Massa	
3.	Terlaksananya pemanfaatan teknologi informasi	Persentase Kerjasama Informasi dengan Media Massa	
4.	Meningkatnya SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Persentase pembinaan SDM Bidang Komunikasi	

Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan (APBD/APBN)
Program Informasi dan Komunikasi Publik	Rp 1.075.775.000,-	APBD
➤ Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Rp 1.075.775.000,-	
- Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Rp 1.075.775.000,-	

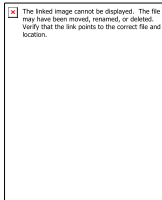
Pihak Kedua
**Kepala Dinas Komunikasi,
Informatika, Statistik Dan Persandian**



dr. H. RESON RUSDIANTO, M.A.P
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19770222 200604 1 012

Pihak Pertama
**Kepala Bidang Informasi dan
Komunikasi Publik**

RUBI KUSWANTO, S.Sos.I., M.A.P
Pembina (IV/a)
NIP. 19771231 200903 1 006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 **DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ALPISAH, ST., MM
Jabatan : Kepala Bidang Teknologi Informatika, Telekomunikasi dan E-Government

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. H. RESON RUSDIANTO, M.A.P
Jabatan : Kepala Dinas Kominfo, Statistik Dan Persandian

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, Februari 2023

Pihak Kedua

**Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik Dan Persandian**



dr. H. RESON RUSDIANTO, M.A.P
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19770222 200604 1 012

Pihak Pertama

**Kepala Bidang Teknologi Informatika,
Telekomunikasi dan E-Government**

ALPISAH, ST., MM
Pembina (IV/a)
NIP. 19780413 200604 2 032

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

No.	Sasaran Kinerja/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Persentase pembinaan SDM Bidang Komunikasi	100%
2.	Meningkatnya Pembangunan jaringan komunikasi dan informatika	Persentase pembangunan Jaringan Komunikasi dan Informatika kab seruyan	
3.	Meningkatnya Perkembangan Aplikasi Informasi	Persentase pengembangan aplikasi yang ada di Pemerintah Kab. Seruyan (aplikasi Perangkat Daerah yang terintegrasi)	
4.	Meningkatnya cakupan Infrastruktur Jaringan Komunikasi dan Informatika	Rasio Perangkat Daerah yang tercakup Jaringan Komunikasi dan Informatika	

Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan (APBD/APBN)
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp 177.712.000,-	APBD
➤ Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Rp 177.712.000,-	
- Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Rp 127.712.000,-	
- Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Rp 50.000.000,-	

Pihak Kedua

**Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik Dan Persandian**

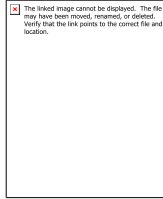


dr. H. RESON RUSDIANTO, M.A.P
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19770222 200604 1 012

Pihak Pertama

**Kepala Bidang Teknologi Informatika,
Telekomunikasi dan E-Government**

ALPISAH, ST., MM
Pembina (IV/a)
NIP. 19780413 200604 2 032



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : MASHURI, S.Hut, MM

Jabatan : Kepala Bidang Statistik

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. H. RESON RUSDIANTO, M.A.P

Jabatan : Kepala Dinas Kominfo, Statistik Dan Persandian

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, Februari 2023

Pihak Kedua

**Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik Dan Persandian**



dr. H. RESON RUSDIANTO, M.A.P
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19770222 200604 1 012

Pihak Pertama

Kepala Bidang Statistik

MASHURI, S.Hut, MM
Pembina (IV/a)
NIP. 19800324 200604 1 017

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

No.	Sasaran Kinerja/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya program penyelenggaraan statistik sektoral	Persentase Pelaksanaan Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	100%

Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan (APBD/APBN)
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp 50.000.000,-	APBD
➤ Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rp 50.000.000,-	
- Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral	Rp 50.000.000,-	

Pihak Kedua

**Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik Dan Persandian**

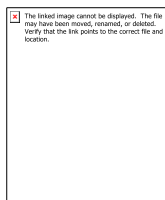


dr. H. RESON RUSDIANTO, M.A.P
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19770222 200604 1 012

Pihak Pertama

Kepala Bidang Statistik

MASHURI, S.Hut, MM
Pembina (IV/a)
NIP. 19800324 200604 1 017



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : M. FAHMI ANSHARI, S.H., M.A.P

Jabatan : Kepala Bidang Persandian

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. H. RESON RUSDIANTO, M.A.P

Jabatan : Kepala Dinas Kominfo, Statistik Dan Persandian

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang,

Februari 2023

Pihak Kedua

**Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik Dan Persandian**



dr. H. RESON RUSDIANTO, M.A.P
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19770222 200604 1 012

Pihak Pertama
Kepala Bidang Persandian

M. FAHMI ANSHARI, S.H., M.A.P
Penata (III/c)
NIP. 19761029 199903 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

No.	Sasaran Kinerja/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan program penyelenggaraan persandian untuk pengaman informasi	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	100%

Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan (APBD/APBN)
Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Rp 15.000.000,-	APBD
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - Sub Kegiatan Pelaksanaan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumberdaya keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota 	<p>Rp 15.000.000,-</p> <p>Rp 15.000.000,-</p>	

Pihak Kedua

**Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik Dan Persandian**

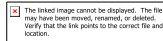


dr. H. RESON RUSDIANTO, M.A.P
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19770222 200604 1 012

Pihak Pertama

Kepala Bidang Persandian

M. FAHMI ANSHARI, S.H., M.A.P
Penata (III/c)
NIP. 19761029 199903 1 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 **DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : IKA PRAWARASARI, SE

Jabatan : Kasubbag Penyusunan Program dan Keuangan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : BONO SUHENDRA, ST

Jabatan : Sekretaris Dinas Kominfo, Statistik Dan Persandian

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, Februari 2023

Pihak Kedua

**Sekretaris Dinas Komunikasi,
Informatika, Statistik Dan Persandian**

BONO SUHENDRA, ST
Pembina (IV/a)
NIP. 19740729 200604 1 015

Pihak Pertama

**Kasubbag Penyusunan Program dan
Keuangan**

IKA PRAWARASARI, SE
Penata Tk.I (III/d)
NIP. 19870113 201001 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

No.	Sasaran Kinerja/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100%
		Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan (APBD/APBN)
➤ Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 8.250.000,-	APBD
- Sub Kegiatan Penyusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 4.5000.000,-	
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 3.750.000,-	
➤ Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 3.626.363.802,-	
- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 3.624.203.802,-	
- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 8.250.000,-	

Pihak Kedua

**Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik Dan Persandian**



BONO SUHENDRA, ST
Pembina (IV/a)
NIP. 19740729 200604 1 015

Pihak Pertama

**Kasubbag Penyusunan Program dan
Keuangan**



IKA PRAWARASARI, SE
Penata Tk.I (III/d)
NIP. 19870113 201001 2 001

The linked image cannot be displayed. The file may have been moved, renamed, or deleted. Verify that the link points to the correct file and location.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : MAWARTI NINGSIH, A.Md

Jabatan : Kasubbag Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : BONO SUHENDRA, ST

Jabatan : Sekretaris Dinas Kominfo, Statistik Dan Persandian

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, Februari 2023

Pihak Kedua

**Sekretaris Dinas Komunikasi,
Informatika, Statistik Dan Persandian**



BONO SUHENDRA, ST
Pembina (IV/a)
NIP. 19740729 200604 1 015

Pihak Pertama

**Kasubbag Umum, Perlengkapan dan
Kepegawaian**



MAWARTI NINGSIH, A.Md
Penata Muda Tk.I (III/b)
NIP. 19720919 201001 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

No.	Sasaran Kinerja/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%
		Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
		Jumlah Kegiatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
		Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
		Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan (APBD/APBN)
➤ Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 69.560.000,-	APBD
- Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp 69.560.000,-	
➤ Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 858.760.000,-	
- Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Rp 3.635.000,-	
- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 249.872.500,-	
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 3.293.500,-	
- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 94.999.000,-	
- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Rp 9.250.000,-	
- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 11.580.000,-	
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 486.130.000,-	

➤ Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 21.000.000,-
- Pengadaan Mebel	Rp 21.000.000,-
➤ Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 765.162.872,-
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 4.400.000,-
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 99.959.400,-
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 660.803.472,-
➤ Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 201.545.800,-
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabaran	Rp 177.915.800,-
- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 23.630.000,-

Pihak Kedua

**Sekretaris Dinas Komunikasi,
Informatika, Statistik Dan Persandian**



BONO SUHENDRA, ST
Pembina (IV/a)
NIP. 19740729 200604 1 015

Pihak Pertama

**Kasubbag Umum, Perlengkapan dan
Kepegawaian**



MAWARTI NINGSIH, A.Md
Penata Muda Tk.I (III/b)
NIP. 19720919 201001 2 001

BAB VI

PENUTUP

Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan tahun 2023 dapat dimanfaatkan sebagai tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, selain itu juga sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Dalam penyusunan laporan Perjanjian Kinerja ini telah berusaha semaksimal mungkin, namun laporan ini masih banyak kekurangan yang tentunya memerlukan evaluasi sebagai penyempurnaan dalam penulisan serta perumusan kebijakan selanjutnya dan diikuti peningkatan kinerja yang lebih baik serta kerja keras oleh seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara Khusus Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang **Good Governance** dan **Clean Government**.

**Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian**



dr. H. RESON RUSDIANTO, M.A.P
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19770222 200604 1 012

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pada Tahun Anggaran 2023, Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan telah menetapkan 5 (lima) sasaran strategis yang akan dicapai. Ke lima sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan 5 (lima) indikator kinerja. Pengukuran indikator kinerja digunakan sebagai dasar untuk penilaian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai.

Metode evaluasi kinerja ialah dengan membandingkan target indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasi kinerja sehingga dapat diketahui persentase capaian dari indikator kinerja.

Adapun cara penilaian capaian pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini ialah sebagai berikut:

1. Berhasil : 80-100%
2. Cukup Berhasil : 60-79%
3. Tidak Berhasil : <60%

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Persentase jumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100	93,64	93,64

2.	Meningkatnya program informasi dan komunikasi publik	Persentase cakupan layanan telekomunikasi	100	99,66	99,66
3.	Meningkatnya program aplikasi informatika	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	100	28,06	28,06
4.	Meningkatnya program penyelenggaraan statistik sektoral	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	100	85,90	85,90
5.	Meningkatnya program penyelenggaraan persandian untuk pengaman informasi	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	100	0	0

A. Analisis Capaian Kinerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Tahun 2023

Sasaran I : Meningkatkan Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota

Tabel Pencapaian Kinerja

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Th.2023	Realisasi Kinerja Th.2023	% Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Persentase jumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100	93,64	93,64

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Th.2023	Realisasi Kinerja Th.2023	% Capaian Kinerja		
					2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Persentase jumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100	93,64	100	100	93,64

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode RENSTRA

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Th.2021	Realisasi Kinerja Th.2022	Realisasi Kinerja Th.2023	Target Akhir Renstra
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Persentase jumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100	100	93,64	100

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Th.2023	Standar Nasional	Keterangan (+/-)
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Persentase jumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	93,64	-	-

Penyebab keberhasilan/peningkatan pencapaian kinerja :

- 1.PPTK melaksanakan kegiatannya sesuai jadwal (*schedule*);
- 2.Dukungan sumber daya manusia yang memadai.

Penyebab kegagalan/penurunan pencapaian kinerja :

- 1.Tidak ada penurunan capaian kinerja karena semua kegiatan terlaksana sesuai target.

Langkah – Langkah alternatif serta solusi yang telah dilakukan:

- 1.Selalu melakukan koordinasi dengan semua pihak terkait untuk kelancaran kegiatan.

Tabel efesiensi penggunaan sumberdaya keuangan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian Keuangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Persentase jumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100	93,64	93,64	5.479.767.474	5.131.064.136	93,64

Tabel perbandingan capaian kinerja dengan capaian keuangan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Persentase jumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	93,64	93,64	100

Tabel program, kegiatan, sub kegiatan Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6		
1.	Meningkatnya Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Persentase jumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.500.000 3.750.000	4.500.000 3.750.000
				2. Administrasi Keuangan	1. Penyediaan Gaji dan	2.773.331.302	2.540.433.195

				Perangkat Daerah	Tunjangan ASN 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.160.000	2.160.000
				3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60.100.000 213.115.500	59.668.000 212.186.209
				4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.400.000 99.959.400 575.098.472	4.400.000 62.175.917 533.650.639
				5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	177.915.800	168.198.500

				tah Daerah	Kendaraan Dinas jabatan 2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.630.000	23.630.000
				6.Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Penyediaan Kompenen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 6.Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 7.Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.635.000 593.219.500 3.293.500 113.699.000 11.580.000 786.130.000 9.250.000	3.635.000 568.501.120 3.286.800 113.694.500 11.524.000 785.620.256 9.250.000
						5.479.767.474	5.131.064.136

Sasaran 2 : Meningkatnya program informasi dan komunikasi publik

Tabel Pencapaian Kinerja

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Th.2023	Realisasi Kinerja Th.2023	% Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya program informasi dan komunikasi publik	Persentase cakupan layanan telekomunikasi	100	99,66	99,66

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Th.2023	Realisasi Kinerja Th.2023	% Capaian Kinerja		
					2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya program informasi dan komunikasi publik	Persentase cakupan layanan telekomunikasi	100	99,66	99,62	100	99,66

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode RENSTRA

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Th.2021	Realisasi Kinerja Th.2022	Realisasi Kinerja Th.2023	Target Akhir Renstra
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya program informasi dan komunikasi publik	Persentase cakupan layanan telekomunikasi	99,62	100	99,66	100

Tabel Perbandingan Realiasi Kinerja dengan Standar Nasional

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Th.2023	Standar Nasional	Keterangan (+/-)
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya program informasi dan komunikasi publik	Persentase cakupan layanan telekomunikasi	99,66	-	-

Penyebab keberhasilan/peningkatan pencapaian kinerja :

1.Terlaksananya kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi public pemerintah daerah kabupaten/ kota.

Penyebab kegagalan/penurunan pencapaian kinerja :

- 1.Keterbatasan anggaran;
- 2.Kurangnya Sumber daya manusia;
- 3.kurangnya infrastruktur.

Langkah – Langkah alternatif serta solusi yang telah dilakukan:

- 1.Mengadakan rapat intern dengan tim TAPD untuk memohon penambahan anggaran dan infrastruktur;
- 2.Mengajukan usulan nota dinas untuk BKPSDM untuk pengajuan usulan penambahan SDM;
- 3.Membuat surat permohonan.

Tabel efesiensi penggunaan sumberdaya keuangan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian Keuangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya program informasi dan komunikasi publik	Persentase cakupan layanan telekomunikasi	100	99,66	99,66	1.546.650.000	1.541.368.759	99,66

Tabel perbandingan capaian kinerja dengan capaian keuangan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya program informasi dan komunikasi publik	Persentase cakupan layanan telekomunikasi	100	99,66	100

Tabel program, kegiatan, sub kegiatan Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6		
1.	Meningkatnya program informasi dan komunikasi publik	Persentase cakupan layanan telekomunikasi	Informasi dan Komunikasi Publik	1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1. Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1.546.650.000	1.541.368.759

Sasaran 3 : Meningkatnya program aplikasi informatika

Tabel Pencapaian Kinerja

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Th.2023	Realisasi Kinerja Th.2023	% Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya program aplikasi informatika	Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet	100	28,06	28,06

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Th.2023	Realisasi Kinerja Th.2023	% Capaian Kinerja		
					2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya program aplikasi informatika	Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet	100	28,06	91,20	55,69	28,06

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode RENSTRA

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Th.2021	Realisasi Kinerja Th.2022	Realisasi Kinerja Th.2023	Target Akhir Renstra
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya program aplikasi informatika	Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet	91,20	55,69	28,06	100

Tabel Perbandingan Realiasi Kinerja dengan Standar Nasional

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Th.2023	Standar Nasional	Keterangan (+/-)
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya program aplikasi informatika	Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet	28,06	-	-

Penyebab keberhasilan/peningkatan pencapaian kinerja :

- 1.Adanya dukungan penuh dari kepala dinas terhadap Program Aplikasi Informatika;
- 2.Adanya program kegiatan pendukung dari Kementrian Kominfo RI perihal peningkatan Program Aplikasi Informatika;
- 3.dari BAKTI Kemkominfo RI perihal penambahan jaringan internet dan BTS 4G bagi desa-desa di Kab. Seruyan.

Penyebab kegagalan/penurunan pencapaian kinerja :

- 1.Adanya keterbatasan anggaran;
- 2.Masih minimnya sarana dan prasarana infrastruktur TI;
- 3.Masih minimnya SDM pengelola Program Aplikasi Informatika.

Langkah – Langkah alternatif serta solusi yang telah dilakukan:

- 1.Membuat regulasi dan produk hukum terkait Program Aplikasi Informatika;
- 2.Mengajukan usulan penambahan sarana dan prasarana serta pembiayaan melalui program Kementrian Kominfo RI;

3. Melakukan Studi tiru sinkronisasi program dan kegiatan serta inovasi pada Dinas Kominfosantik provinsi maupun Dinas Kominfosantik yang lebih maju.

Tabel efesiensi penggunaan sumberdaya keuangan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian Keuangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya program aplikasi informatika	Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet	100	28,06	28,06	127.712.000	35.830.000	28,06

Tabel perbandingan capaian kinerja dengan capaian keuangan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya program aplikasi informatika	Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet	28,06	28,06	45

Tabel program, kegiatan, sub kegiatan Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6		
1.	Meningkatnya program aplikasi informatika	Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet	Aplikasi Informatika	1. Pengelolaan e-Government dilingkup pemerintah daerah	1. Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah	127.712.000	35.830.000

Sasaran 4 : Meningkatnya Program Penyelenggara Statistik Sektoral

Tabel Pencapaian Kinerja

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Th.2023	Realisasi Kinerja Th.2023	% Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Program Penyelenggara Statistik Sektoral	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	100	85,90	85,90

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Th.2023	Realisasi Kinerja Th.2023	% Capaian Kinerja		
					2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya Program Penyelenggara Statistik Sektoral	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	100	85,90	61,76	66,18	85,90

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode RENSTRA

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Th.2021	Realisasi Kinerja Th.2022	Realisasi Kinerja Th.2023	Target Akhir Renstra
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Program Penyelenggara Statistik Sektoral	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	61,76	66,18	85,90	100

Tabel Perbandingan Realiasi Kinerja dengan Standar Nasional

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Th.2023	Standar Nasional	Keterangan (+/-)
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Program Penyelenggara Statistik Sektoral	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	85,90	-	-

Penyebab keberhasilan/peningkatan pencapaian kinerja :

- 1.Tercukupinya anggaran untuk penyelenggaraan statistic sectoral daerah;
- 2.Tersedianya SDM Statistik sebagai pengolah data statistic;
- 3.Adanya komitmen bersama dari masing-masing OPD untuk mendukung satu data Indonesia yang dimulai dari daerah.

Penyebab kegagalan/penurunan pencapaian kinerja :

- 1.Tidak terpenuhinya anggaran untuk penyelenggaraan statistic sectoral daerah sesuai dengan NSPK(Normal Standar Prosedur dan Kriteria);
- 2.Belum tersedianya SDM Statistik sebagai pengolah ragam data statistic yang diselenggarakan didaerah;
- 3.Kurang komitmennya dari beberapa OPD sebagai produsen data.

Langkah – Langkah alternatif serta solusi yang telah dilakukan:

1. Menyampaikan ke pemangku kepentingan akan pentingnya anggaran dalam penyelenggaraan statistik sektoral di daerah untuk pembangunan dan evaluasi pembangunan daerah;
2. Memfasilitasi perekrutan SDM dari lulusan statistik;
3. Melakukan pembinaan rutin kepada produsen data OPD.

Tabel efisiensi penggunaan sumberdaya keuangan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian Keuangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya Program Penyelenggara Statistik Sektoral	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	100	85,90	85,90	50.000.000	42.950.000	85,90

Tabel perbandingan capaian kinerja dengan capaian keuangan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Program Penyelenggara Statistik Sektoral	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	85,90	85,90	85,90

Tabel program, kegiatan, sub kegiatan Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6		
1.	Meningkatnya Program Penyelenggara	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Penyelenggara Statistik Sektoral	1. Penyelenggaraan Statistik Sektoral	1. Koordinasi, Sinkronisasi, Pengumpulan	50.000.000	42.950.000

	Statistik Sektoral			dilingku p Daerah Kabupat en/ Kota	n,Pengolaha n Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral		
--	-----------------------	--	--	---	---	--	--

Sasaran 5 : Meningkatnya program penyelenggaraan persandian untuk pengaman informasi

Tabel Pencapaian Kinerja

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Th.2023	Realisasi Kinerja Th.2023	% Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya program penyelenggaraan persandian untuk pengaman informasi	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	100	0	0

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Th.2023	Realisasi Kinerja Th.2023	% Capaian Kinerja		
					2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya program penyelenggara	Persentase perangkat daerah yang	100	0	-	100	0

	an persandian untuk pengaman informasi	telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah					
--	--	---	--	--	--	--	--

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode RENSTRA

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Th.2021	Realisasi Kinerja Th.2022	Realisasi Kinerja Th.2023	Target Akhir Renstra
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya program penyelenggaraan persandian untuk pengaman informasi	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	-	100	-	100

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Th.2023	Standar Nasional	Keterangan (+/-)
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya program penyelenggaraan persandian untuk pengaman informasi	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi	-	-	-

		perangkat daerah			
--	--	------------------	--	--	--

Penyebab keberhasilan/peningkatan pencapaian kinerja :

- 1.Kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik;
- 2.Koordinasi dengan kementerian mendapat dukungan penuh begitu juga dengan provinsi;
- 3.Kerjasama tim dan koordinasi anggaran yang baik.

Penyebab kegagalan/penurunan pencapaian kinerja :

- 1.Belum tersedianya anggaran;
- 2.SDM yang belum lengkap;
- 3.Fasilitas kurang memadai.

Langkah – Langkah alternatif serta solusi yang telah dilakukan:

- 1.Bekerjasama dengan dinas provinsi dan kementrian;
- 2.Bekerjasama dengan bidang-bidang dan sekretaris dinas;
- 3.Mengajukan dan melaporkan kendala secara rutin ke dinas terkait.

Tabel efesiensi penggunaan sumberdaya keuangan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian Keuangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya program penyelenggaraan persandian untuk pengaman informasi	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	100	-	-	15.000.000	-	-

Tabel perbandingan capaian kinerja dengan capaian keuangan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya program penyelenggaraan persandian untuk pengaman informasi	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	0	0	0

Tabel program, kegiatan, sub kegiatan Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya program penyelenggaraan persandian untuk pengaman informasi	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	1. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	1. Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ kota	15.000.000	0

B. Realisasi Anggaran (Akuntabilitas Keuangan)

Tabel Realisasi keuangan terhadap sasaran kinerja prioritas

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
1.	Sasaran I.1.2 Terwujudnya pemerintahan yang berkinerja Tinggi	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	7.219.129.474	6.751.212.895	93,52
	Total		7.219.129.474	6.751.212.895	93,52

Tabel perbandingan anggaran prioritas pembangunan dengan anggaran rutin

No	Anggaran Prioritas(Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Capaian Keuangan	Anggaran Rutin (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Capaian Keuangan
1	2	3	4	5	6	7
1.	1.546.650.000	1.541.595.048	99,66	5.479.767.474	5.131.064.136	93,64
2.	127.712.000	35.830.000	28,06			

Tabel Realisasi Anggaran Tahun 2023

No	Total Anggaran Prioritas Pembangunan dan Rutin	Total Realisasi Anggaran (Rp)	% Capaian Keuangan
1		3	4
1.	Rp 7.154.129.474	6.708.489.184	73,78

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan selama satu tahun. Berdasarkan uraian dari capaian kinerja pada tahun anggaran 2023 diatas, dapat disimpulkan bahwa :

1. Program dan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp.7.219.129.474,00 telah terealisasi Rp 6.751.212.895,00 (93,52%).
2. Capaian kinerja untuk sasaran strategis 2023 yaitu :
Berdasarkan Capaian Kinerja 5 (lima) sasaran strategis, dengan 5 (lima) indikator yang dilaksanakan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan pada tahun 2023 sebesar : 93,52 %, dengan **kriteria Berhasil**.
 - a. Meningkatnya penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota sebesar 93,64% (berhasil)
 - b. Meningkatnya program informasi dan komunikasi publik, dengan indikator Persentase cakupan layanan telekomunikasi sebesar 99,66% (berhasil).
 - c. Meningkatnya program aplikasi informatika, dengan indicator Proporsi rumah tangga dengan akses internet sebesar 28,06%(tidak berhasil).
 - d. Meningkatnya program penyelenggaraan statistik sektoral, dengan indikator Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi 85,90% (berhasil).
 - e. Meningkatnya program penyelenggaraan persandian untuk pengaman informasi, dengan indikatornya adalah Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah sebesar 0 % (tidak berhasil).

B. Saran

Melalui Laporan ini maka dapat diketahui tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas kedinasan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan. Untuk kelanjutan pelaksanaan kegiatan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan agar :

- a. Dalam membuat perencanaan program dan kegiatan lebih baik terkoordinasi, antisipatif dan terintegrasi sehingga tidak akan mengalami permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaannya dan mengacu pada renstra 2019-2023.
- b. Peningkatan kompetensi SDM khususnya terkait dengan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.
- c. Perlunya peningkatan kerjasama dengan Lembaga/satuan kerja/organisasi/komunitas yang berkecimpung dalam program atau kegiatan Teknologi Informasi dan Komunikasi sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik.